

# Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 untuk Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara

## *Implementation of Coal District Regional Regulation Policy No. 9 of 2014 for the Development of Community-Based Historical Beach Tourism in Increasing Regional Original Income in Batubara Regency*

Faizal, Budi Hartono\* & Isnaini

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 08 Februari 2023; Direview: 12 Februari 2023; Disetujui: 15 Mei 2023

\*Corresponding Email: [budihartono@staff.uma.ac.id](mailto:budihartono@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi telah berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya finansial dan sarana prasarana, serta sikap pelaksana kebijakan yang tidak selalu positif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 Kabupaten Batu Bara memberikan dampak positif pada pemasukan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perda Kabupaten Batu Bara, Pengembangan Pariwisata: Pendapatan Asli Daerah.

### Abstract

The purpose of this writing is to analyze the implementation of Regional Regulation of Batu Bara District No. 9 of 2014 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for the period of 2014-2029 and the challenges faced in developing Community-Based Historical Beach Tourism to increase Local Revenue in Batu Bara District. This research used a descriptive method with a qualitative descriptive data analysis technique. Primary data was obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the research showed that in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the implementation has been optimal. The challenges faced include limited financial resources and infrastructure, as well as the attitude of policy implementers which is not always positive towards the implementation of the policy. The implementation of Regional Regulation No. 9 of 2014 in Batu Bara District has a positive impact on local revenue, thereby increasing the Local Revenue.

**Keywords:** Implementation, Regional Regulation of Batu Bara Regency, Tourism Development: Regional Original Income.

**How to Cite:** Faizal, Hartono, B. & Isnaini. (2023). Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara No. 9 Tahun 2014 untuk Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(4): 3278- 3290.



## PENDAHULUAN

Perkembangan industri pariwisata menjadikan sektor ini dapat diandalkan untuk pembangunan daerah (Revida et al., 2020). Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara menempatkan pariwisata berbasis masyarakat menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk mendorong percepatan target pembangunan daerah (Sugihamretha, 2020). Pembentukan desa/kawasan wisata beserta kelompok sadar wisata pada obyek wisata potensial diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga lokal dan melestarikan budaya dan lingkungan setempat. Pengembangan ekowisata Pantai Sejarah berbasis masyarakat memiliki harapan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Sektor pariwisata tentunya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Zhang et al (dalam Strydom Mangope, & Henama) mencatat bahwa pariwisata adalah sebagai industri koordinasi intens di mana berbagai produk atau jasa (transportasi, akomodasi, dan sebagainya) digabungkan bersama untuk membentuk produk pariwisata akhir (Strydom, Mangope, & Henama, 2018).

Pentingnya mewujudkan pengembangan destinasi wisata akan mendorong peran serta pemerintah daerah dalam menata potensi alamnya, sehingga akan berdaya guna dalam menambah pendapatan asli daerah (Sabrina & Mudzhalifah, 2018). Pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata sebagai penggerak untuk kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur (Yusrizal, Nikmaturridha, & Khairuddin, 2015). Organisasi pariwisata dunia WTO (*World Tourism Organization*) memperkirakan wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan per tahun sebesar 3,3 persen. Oleh sebab itu, banyak negara di dunia berpacu dan berbenah diri untuk membangun industri pariwisatanya. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya sehingga menghasilkan berbagai macam keindahan alam dan satwa yang menjadi destinasi wisata. Sejalan dengan penjelasan ini pariwisata setiap daerah di Indonesia perlu dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke objek wisata tersebut (Simanjuntak, Tanjung, & Nasution, 2017).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menjadi landasan yang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengembangkan seluruh kekayaannya (Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015). Pendapatan dari otonomi pariwisata ini nantinya akan dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi tanpa harus semua tergantung pada pemerintah pusat (Soebagyo, 2018). Pendapatan dari pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan juga menjadi penambah pendapatan asli daerah. Dengan adanya otonomi pengembangan pariwisata daerah ini, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tuntutan untuk mengembangkan semua sumber daya alamnya. Bukan hanya itu saja, dengan pengembangan sumber daya alam diharapkan juga pemerintah daerah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan harapan agar masyarakat di daerah menjadi masyarakat yang mandiri (Sayekti, 2019).

Seperti halnya pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan (Heri, Nasution, & Isnaini, 2020). Kabupaten Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 152 Desa/Kelurahan definitif. Kelebihan itu telah disadari oleh pemerintahan Kabupaten Batu Bara pada sektor pariwisatanya. Pariwisata diharapkan dapat membawa berbagai manfaat yang cukup berarti dalam pembangunan, karena berbagai kegiatan dalam bidang kepariwisataan dapat meningkatkan perekonomian yang signifikan bagi masyarakat suatu wilayah. Demikian pula bagi Kabupaten Batu Bara, saat ini pariwisata telah dikembangkan menjadi bagian dari sektor yang diharapkan mampu memberikan pengaruh bagi pembangunan di kabupaten ini (Rahimah, Ariani, Rosmasita, Yanti, & Fani, 2020).

Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat memberikan tambahan bagi Penghasilan Asli Daerah (PAD). Kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Batu Bara, dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan memiliki beberapa peran penting, yaitu: (1) pariwisata pedesaan merupakan satu dari sedikit pilihan yang layak untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi pedesaan. Melalui pariwisata, kawasan pedesaan akan terjadi perbaikan infrastruktur, aliran modal masuk, kewirausahaan, dan arus barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan; (2) pariwisata pedesaan merupakan salah satu media yang mampu mengalihkan atau mendistribusi peluang ekonomi dari daerah perkotaan ke pedesaan. Transfer peluang sumber daya ekonomi ini penting mengingat kawasan pedesaan masih terperangkap oleh pusaran kuat kemiskinan yang ditandai antara lain oleh aktivitas non-pertanian yang lemah, keterbatasan infrastruktur dan akses yang terbatas terhadap jasa-jasa yang penting; (3) pariwisata pedesaan dapat mengakselerasi (a) pertumbuhan, diversifikasi, dan kestabilan ekonomi, (b) perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan, (c) pengurangan potensi migrasi ke kota sekaligus keseimbangan distribusi penduduk, (d) perbaikan dan pemeliharaan layanan publik dan infrastruktur dasar, dan (e) revitalisasi industri kerajinan, tradisi, dan identitas budaya (Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, Nurhayati, Fitriyani, & Pratiwi, 2020; Wahyuningsih & Pradana, 2021).

Aspek pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai upaya penguatan dan peningkatan kapasitas peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, berperan aktif dan strategis sebagai subjek maupun penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan (Firman, 2021). Konsep tersebut memberikan gambaran posisi masyarakat yang strategis sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Dalam upaya pengembangan potensi desa wisata tentunya harus melibatkan masyarakat dan kelompok penting lainnya. Keberadaan masyarakat dan kelompok-kelompok ini yang akan menjadi pintu gerbang masuk, untuk dapat leluasa mengembangkan potensi wisata yang berbasis masyarakat (Nugraha, Perbawasari, Zubair, & Novianti, 2019). Pariwisata pedesaan merupakan salah satu cara dalam menerapkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan mengembangkan desa wisata, maka diharapkan adanya distribusi yang merata sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Lestari, Armawi, & Muhammad, 2016; Saputra, 2020).

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa peran dan posisi masyarakat baik sebagai subjek dan penerima manfaat pengembangan masih belum berjalan optimal. Belum optimalnya, peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata disebabkan beberapa hal, antara lain, karena masih lemahnya kapasitas dan kemampuan masyarakat lokal sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk terlibat dan menjadi bagian dari industri kepariwisataan yang berkembang (Ginting, Kismartini, Yuniningsih, & Afrizal, 2021). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat jika berhasil baik, tentu akan memiliki dua tujuan penting, yaitu terciptanya pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat desa (Yatmaja, 2019). Peran penting pengembangan dan upaya memajukan Pantai Sejarah di Kabupaten Batu Bara harus secara terus menerus dikembangkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Pantai Sejarah kabupaten Batu Bara Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 tahun 2014.

Sebagai bahan perbandingan dan gap di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Dwi Perdana Syah (2019), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Desa wisata Banjarejo merupakan desa wisata yang menggabungkan pariwisata sejarah dan budaya kuno, pentingnya nilai-nilai budaya dan pengetahuan sejarah kuno akan membuat potensi pariwisata desa wisata Banjarejo meningkat. Dalam mengembangkan potensi desa Banjarejo, tentunya harus melibatkan peran masyarakat, komunitas, dan kelompok penting lainnya. Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat yang diterapkan dalam mencapai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diterapkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, masyarakat memiliki peran penting dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari kegiatan tersebut (Syah, 2019)

Kedua penelitian dari Fiqih Umi Zakiah (2019), penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel dan PDRB terhadap

PAD Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam tentang pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dalam membangun infrastruktur di Kota Bandar Lampung (Zakiah, 2019).

Ketiga, penelitian dari Maulana Yusup (2019) pariwisata adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai pengelolaan serta fasilitas yang sesuai dengan aturan yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah (Yusup, 2019).

Keempat, penelitian dari Nita Bonita (2016), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari prasarana dan sarana yang ada di kawasan wisata Labuan Cermin termasuk di dalamnya aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dari segi akses jalan dari Ibukota yaitu Tanjung Redeb ke Kecamatan Biduk-Biduk dalam kondisi rusak sehingga membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama (Bonita, 2016).

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dan kendala-kendala yang dihadapi bagi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Somantri, 2010). Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kualitatif akan tetapi penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif, dalam menemukan: analisis pengaruh kebijakan strategis pengembangan pariwisata pantai sejarah berbasis masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Batu Bara (Ahmadi, 2014). Peneliti harus menemukan data-data terkait dengan penelitian secara mendalam dan tidak menekankan pada penilaian yang bersifat umum, namun lebih menekankan pada makna.

Menurut pendapat peneliti subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Objek penelitian sebagai sumber penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh masyarakat di sekitar Pantai Sejarah, pengunjung Pantai Sejarah, petugas pengutip retribusi Pantai Sejarah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara (Wardiyanta, 2006).

Penelitian kualitatif sangat membutuhkan informan penelitian. Menurut Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari penelitian (Moleong, 2018). Informan harus mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan sukarelanya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan menjadi latar peneliti. Usaha menemukan informan dilakukan dengan cara: melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain); melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Kemudian penulis menyimpulkan kriteria pemilihan informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: tokoh masyarakat adat Melayu dan masyarakat yang diberdayakan di lingkungan Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara; pengunjung yang sengaja datang di Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara; petugas retribusi Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara; bagian pengelola retribusi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara.



Penelitian ini dilakukan di Pantai Sejarah, Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan maksud memahami fenomena, persepsi, motivasi, tindakan dan pandangan responden dalam bentuk cerita rinci dari hasil pengamatan di lapangan terkait program-program pemerintah dalam pengembangan Pantai Sejarah berbasis masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber data dan informan penelitian pengambilan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data antara lain: data primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada responden; serta data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan penelaahan studi kepustakaan, referensi-referensi, Peraturan Perundang-Undangan. Peneliti memperoleh data melalui beberapa informan antara lain adalah: Pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara, sebanyak 3 orang; tokoh masyarakat/pengetua dan masyarakat yang diberdayakan di Desa Perupuk dan Pantai Kabupaten Batu Bara berjumlah 8 orang dan pengunjung Pantai Sejarah Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten batu Bara sebanyak 6 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 1) studi lapangan (*field research*) yaitu aktivitas penelitian untuk mencari data yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara: wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu), Observasi, observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung, serta studi Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mempelajari dan mengumpulkan data-data literatur serta sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian (Zed, 2014).

Teknik penelitian ini adalah kualitatif dan pada penelitian ini dilakukan pada proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami” (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisis data tersebut antara lain: 1) reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data dalam penelitian ini; 2) penyajian data (*display data*) dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian; 3) penarikan kesimpulan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan unsur penting dalam teknik analisis data pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013).

Menurut Moleong analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri-ciri sesuatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya. Makna demikian biasanya divalidasi oleh para anggota budaya sebelum hasil akhirnya dipaparkan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Moleong, 2018). Proses analisis data dalam penelitian ini, di mana peneliti menggunakan pendapat Miles dan Huberman (2014) yaitu; pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan atau verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan triangulasi atau keabsahan penelitian, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis kembali melalui teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dari hasil triangulasi ini maka peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara terdapat adanya kecocokan antara pengamatan peneliti tentang Implementasi

Kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Perda No. 9 Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029

Implementasi kebijakan Perda No. 9 Kabupaten Batu Bara tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029, menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara Bapak Drs. Safri, MM: Pada Kadisporabudpar Batu Bara bahwa Implementasi Perda No. 9 tahun 2014 sudah diterapkan dan telah diundangkan di Kabupaten Batu Bara, dampaknya adalah dibangunnya beberapa destinasi wisata di Kabupaten Batu Bara, termasuk pembenahan objek wisata pantai Sejarah oleh Bupati Batubara. Tetapi sejak diundangkannya kebijakan Perda No. 9 Kabupaten Batu Bara tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029, implementasi kebijakan tersebut bertujuan:

- 1) Meningkatkan akses pembangunan objek - objek wisata di Kabupaten Batubara;
- 2) Mendorong pembangunan destinasi wisata yang sudah masuk pada ruang lingkup Perda Nomor 9 tahun 2014 tersebut;
- 3) Melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat pencinta lingkungan dan wisata serta masyarakat setempat dalam meningkatkan ekoturisme dan ekonomi kreatif sehingga mampu meningkatkan daya saing wisata di kabupaten Batubara yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- 4) Membekali sumber daya manusia/tenaga kerja setempat dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha dibidang ekonomi kreatif dan ekowisata.

Dengan demikian kebijakan tersebut mengharuskan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah melalui ekowisata perlu memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat setempat dan juga dunia usaha, maka seluruh komponen masyarakat sadar wisata di Kabupaten Batu Bara mestinya memiliki tekad untuk semakin memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung pertumbuhan pariwisata sehingga terjadi kesepadanan dan keselarasan antara Pemerintah Daerah, pengusaha, masyarakat serta para pencinta ekonomi wisata dan wisata bahari seperti yang dikembangkan di Pantai Sejarah yang berada Kabupaten Batu Bara.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perda No.9 Kabupaten Batu Bara tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara). Pada implementasi kebijakan Perda Nomor 9 Kabupaten Batu Bara tahun 2014 tersebut menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1984). Data-data kualitatif dan penjelasan-penjelasan kualitatif tentang hal tersebut dirinci menjadi penjelasan dan pembahasan-pembahasan dengan petikan-petikan pendapat dan penjelasan dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan syarat pertama adalah komunikasi, tanpa komunikasi yang baik, maka sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Kemampuan pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada pelaksana kebijakan secara jelas, tepat dan akurat akan berdampak positif bagi pelaksanaan sebuah kebijakan (Hayat, 2018). Dalam proses komunikasi, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi, kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik yang langsung ataupun tidak, dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum (Julitawaty, 2021).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para Kabid, Kasi Dinas Porabudpar, masyarakat sekitar pengembangan objek wisata Pantai Sejarah, tokoh masyarakat pemangku adat di pesisir

Pantai Sejarah, dan para pencinta objek wisata. Menurut peneliti bahwa kejelasan, proses transmisi kebijakan sebaiknya dibarengi dengan kejelasan informasi agar kebijakan yang telah ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Ketidakjelasan informasi akan menghambat implementasi kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan (Nurani Soyomukti, 2010).

Sampai saat ini proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan. Kejelasan informasi terkait kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh para Kabid dan Kasi pada Dinas Porabudpar melalui penyusunan program kerja dengan prioritas program mengarah kepada penguatan kerja sama masyarakat penggiat ekonomi kreatif, diantaranya: (1) penguatan kerja sama di bidang ekonomi kreatif dengan penambahan tempat-tempat pembuatan kerajinan ekonomi kreatif di Kabupaten Batu Bara secara umum dan khususnya di sekitar Pantai Sejarah; (2) penguatan kerja sama di bidang magang para pengrajin ekonomi kreatif dan para pengelola kawasan ekowisata atau objek wisata berbasis masyarakat; (3) penguatan kerja sama di bidang pembentukan kelompok-kelompok pencinta pengembangan ekowisata.

Perlunya konsistensi di dalam implementasi kebijakan yang jelas agar berjalan efektif. Konsistensi terkait dengan sikap, persepsi, dan respons dari pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya (Syahrudin, 2018). Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan (Soyomukti, 2012).

Ditinjau dari sisi konsistensi, pesan implementasi kebijakan Perda No. 9 tahun 2014, sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata disampaikan bahwa Tujuan dilahirkannya Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah, tahun 2014 -2029, telah disosialisasikan secara konsisten kepada masyarakat melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok sasaran.

Selain itu, berdasarkan telaah data yang ada, terlihat jelas bahwa implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tersebut telah dituangkan dalam program kerja masing-masing pelaksana kebijakan, yang mengarah kepada pengembangan objek wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Batu Bara, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan pengembangan objek wisata Pantai Sejarah. Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang pengembangan Kepariwisata Daerah tahun 2014-2029 mampu membawa dampak pada peningkatan retribusi daerah bila dikaitkan dengan pengembangan objek wisata pantai sejarah, sehingga memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pengamatannya ternyata ada hubungan erat antara sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, jika sektor pariwisata terus meningkat, maka pendapatan asli daerah pun meningkat. Penelitian Aprilianto (2016) menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Apabila variasi objek wisata tersebut sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan dalam produk-produk pariwisata lainnya seperti restoran, hotel dan secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Aprilianto, 2016). Objek wisata merupakan salah satu sektor pendukung pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa objek wisata berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Meningkatnya jumlah objek wisata di suatu daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur Birokrasi menurut Edward dalam Winarno (2007) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah) (Winarno, 2007).

Dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP dalam penelitian ini mengacu kepada SOP yang diterapkan oleh Disporabudpar Kabupaten Batu Bara dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sudah mengeluarkan panduan pelaksanaan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 yang berisi strategi dalam implementasi kebijakan perda tentang pengembangan wisata, sehingga dapat dijadikan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan jika ditinjau dari aspek struktur birokrasi adalah *fragmentasi*. *Fragmentasi* bisa diartikan sebagai pendelegasian tanggung jawab dan wewenang suatu kebijakan kepada bidang pelaksana kebijakan, sehingga agar para pelaksana kebijakan tersebut dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik, maka diperlukan koordinasi antar pelaksana kebijakan tersebut. Koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana kebijakan ini akan memberikan dampak atau efek percepatan terlaksananya implementasi kebijakan yang tertuang di dalam Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014.

Dalam setiap tahap kegiatan program-program implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang pengembangan Kepariwisata Daerah tahun 2014-2029 Dinas Porabudpar Kabupaten Batu Bara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Tahap perencanaan, tanggung jawab dan wewenang diberikan kepada Kepala Dinas Porabudpar Kabupaten Batu Bara.
- b) Tahap pelaksanaan, kewenangan diberikan kepada para Kabid dan Kasi pada Dinas Porabudpar Kabupaten Batu Bara.
- c) Tahap pemantauan dan evaluasi, kewenangan diberikan kepada Sekretaris Dinas Porabudpar Kabupaten Batu Bara.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa sudah ada kesesuaian antara tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, pembagian tugas dan wewenang tersebut telah berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan adanya keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kewenangan dan tugas yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, struktur birokrasi pada implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2014-2029 dapat dikatakan sudah berjalan. Hal ini terbukti salah satu pengembangan objek wisata Pantai Sejarah yang sekarang telah terbangun dan telah dikunjungi oleh para turis lokal dan asing. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 ini benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pemasukan bagi retribusi daerah dari objek wisata Pantai Sejarah dan merupakan bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah.

## 3. Sumber Daya

Sumber daya memberikan kontribusi dalam implementasi sebuah kebijakan. Meskipun dalam implementasi sebuah kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sudah jelas dan akurat dalam menyampaikannya, tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak/kurang mempunyai sumber daya (manusia) yang tidak dapat melakukan pekerjaan secara efektif,

maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya atau "*resources*", meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas (Supomo & Nurhayati, 2018). Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif (Nawawi, 2003). Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan:

a) Manusia (Unsur Manusia di Dinas Porabudpar Kabupaten Batu Bara)

Pembahasan tentang staf mengarah kepada kuantitas dan kualitas manusia yang dilibatkan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Pembahasan tentang staf terkait dengan kemampuan (kualitas) serta jumlah (kuantitas) dari pegawai (staf) pelaksana kebijakan yang menjadikan berhasil tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Selain dari aspek kualitas dan jumlah, aspek lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan jika ditinjau dari faktor sumber daya manusia adalah ketrampilan (*skills*). Sehingga dapat dikatakan, bahwa dalam melaksanakan kebijakan Revitalisasi ini, sumber daya utama yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mumpuni, baik dari aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek kecukupan jumlah dan aspek *skills* dari semua pelaksana kebijakan (Ruky, 2003). Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi Perda nomor 9 tahun 2014 Kabupaten Batubara sangat penting sekali, karena menyangkut pelaksanaan kebijakan tersebut.

Implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan Kabupaten Batu Bara, jika ditinjau dari aspek sumber daya yang dimiliki, baik dari segi jumlah maupun *skills* sudah dianggap mampu melaksanakan implementasi perda tersebut. Walaupun masih ada beberapa yang belum sempurna SDM-nya. Dari sisi *skills* atau kemampuan pelaksana kebijakan tidak memiliki keluhan yang cukup substansi. Dikarenakan para pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Selain itu, koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan sering dilakukan, hal ini dibuktikan dengan sering diadakannya rapat koordinasi untuk membahas setiap progres dari implementasi kebijakan dan permasalahan yang muncul, sehingga bisa dengan cepat dicari solusinya.

Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi tentang keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014, sehingga membawa dampak terhadap pengembangan objek pariwisata di Pantai Sejarah. Sejalan dengan pendapat Melinda Eka Putri (2020) bahwa Objek wisata merupakan salah satu sektor pendukung pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa objek wisata berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Meningkatnya jumlah objek wisata di suatu daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (Putri, 2020).

b) Dana (Finansial)

Aspek yang memberikan pengaruh dalam menunjang keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 adalah aspek pendanaan atau aspek finansial. Karena aspek keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

c) Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu kepada sarana prasarana yang mendukung proses implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2014-2029. Berdasarkan hasil observasi ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Batu Bara dan khususnya di objek wisata Pantai Sejarah. Bahwa ketersediaan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 secara perencanaan telah diupayakan pemenuhan terhadap sarana dan prasarannya, namun disadari masih belum memadai sesuai dengan yang disyaratkan oleh industri pariwisata secara umumnya. Terutama dalam program pemenuhan sarana untuk kelas wisatawan mancanegara.

Di sisi lain seperti diketahui, bahwa sumber dana pengembangan objek wisata Pantai Sejarah lebih banyak menggantungkan dari APBD, daripada dana-dana dari para investor. Oleh karena itu, untuk pengembangan yang lebih besar dan lebih lengkap, sehingga memiliki daya pikat

pengunjung, diperlukan pendanaan yang terprogram secara rutin, sehingga pembangunan objek wisata pantai sejarah menjadi lebih baik lagi. Untuk pengembangan objek wisata Pantai Sejarah ini perlu didukung oleh sarana perhotelan, sehingga akan lebih mendukung para wisatawan yang akan berkunjung lebih lama atau ingin menginap jikalau pengunjung berasal dari luar Kabupaten Batu Bara. Dengan jumlah pengunjung yang banyak, secara otomatis dana yang masuk melalui retribusi akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### D) Kewenangan

Ditinjau dari faktor kewenangan, implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah tahun 2014-2029, telah memiliki struktur pelaksana bertingkat, berarti kewenangan secara berjenjang dalam implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 ini sudah berjalan. Artinya terdapat beberapa jenjang jabatan yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggung jawaban secara vertikal dari kewenangan sebagai atasan maupun kewenangan ke jenjang di bawahnya maupun hubungan koordinasi secara horizontal.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kabid Destinasi Wisata Dinas Porabudpar Kabupaten Batu Bara, Ibu Widaruna, SE, bahwa setiap tahap kegiatan implementasi perda nomor 9 tahun 2014, tetap berpedoman pada prinsip menjalankan kewenangan masing-masing di setiap tingkatan jabatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah berwenang memberikan perintah dan arahan terhadap semua Kepala Dinas dan OPD lainnya yang berhubungan dengan suksesnya implementasi Perda nomor 9 tahun 2014.
- 2) Kepala Dinas Porabudpar berwenang memberikan perintah dan arahan kepada para Kabid dan Kasi agar pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 dapat berjalan tanpa hambatan.
- 3) Kabid Dinas Porabudpar berwenang memberikan arahan kepada para kasi agar pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 dapat berjalan secara efektif.
- 4) Kasi pada Dinas Porabudpar berwenang memberikan arahan kepada para pegawai dan juga kelompok-kelompok masyarakat ekonomi kreatif di sekitar objek wisata Pantai Sejarah.

Dari uraian mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing pembuat dan pelaksana kebijakan terlihat adanya kesesuaian antara kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari pendelegasian wewenang tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan yang diberikan.

#### E) Kecenderungan/Sikap

Sikap dan persepsi pelaksana kebijakan terhadap tugas dan tanggung jawabnya merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan agar berjalan efektif. Apabila para pelaksana memiliki sikap dengan cara memberikan dukungan kepada pelaksanaan sebuah kebijakan, maka implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Tetapi sebaliknya, apabila para pelaksana memiliki sikap negatif dengan melakukan penolakan maka implementasi kebijakan juga akan menghadapi hambatan dalam implementasinya. Pembuat kebijakan dapat mengganti para pelaksana kebijakan, jika ditemukan bahwa para pelaksana kebijakan tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang sudah direncanakan. Dua hal penting yang terkait dengan sikap/disposisi adalah, yang pertama sikap dari para pelaksana dan yang kedua terkait dengan inisiatif dari pelaksana.

Berdasarkan pada hal di atas, maka terkait sikap para pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah Bupati Batu Bara, Sekda Batu Bara, Bapeda Batu Bara, Kepala BPKD Batu Bara, Kadis Porabudpar Batu Bara, Kabid dan Kasi Porabudpar Batu Bara sangat mendukung Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2014 Kabupaten Batu Bara tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah tahun 2014-2029. Namun demikian bila dicermati di lapangan memanglah tidak sempurna tentang sikap dari semua yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan di kalangan pengambil keputusan, hal ini berhubungan dengan banyak faktor. Artinya, dalam implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 Kabupaten Batu Bara, para

implementor ada yang menunjukkan sikap positif dan ada pula yang menunjukkan respons negatif terkait penerapan kebijakan tersebut.

#### 4. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2010: 105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*). bagaimana pengetahuan (*cognition*), pemahaman (*comprehension*), pendalaman (*understanding*) (Widodo, 2010). Para *stakeholder* atau orang-orang /sasaran objek implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029.

Pengetahuan para *stakeholder* atau orang-orang/sasaran objek implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029, masih minim dan perlu pelatihan atau sosialisasi-sosialisasi tentang pengetahuan Implementasi tersebut. Jika tidak dilakukan peningkatan pengetahuan-pengetahuan tentang kepariwisataan khususnya pada objek wisata Pantai Sejarah, maka dimungkinkan akan menghambat pelaksanaan implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014.

Tentang Pemahaman (*Comprehension*), bahwa: "Pemahaman para *stakeholder* atau orang-orang/sasaran objek implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029, perlu penekanan terhadap sosialisasi implementasi perda tersebut, jika ini tidak dilakukan akan dapat mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi Perda tersebut.

Tentang Pendalaman (*Understanding*), bahwa: "Pendalaman tentang pemahaman para *stakeholder* atau orang-orang/sasaran objek implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029, belum maksimal, perlu penekanan terhadap sosialisasi implementasi perda tersebut, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan Implementasi nya, jika hal ini tidak dilakukan akan mengganggu proses implementasi perda tersebut.

#### **Kendala Implementasi Perda Kabupaten Batubara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014- 2029**

Hambatan implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029, adalah pada faktor ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya finansial, sumber daya sarana prasarana serta faktor disposisi/sikap dari pelaksana kebijakan. Di mana tidak semua pelaksana kebijakan memberikan respons positif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Bahwa untuk mengimplementasikan Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 masih terdapat kendala dalam hal kemampuan ketrampilan masyarakat di sekitar objek wisata di Kabupaten Batubara yang kurang terampil dalam hal ekonomi kreatif untuk souvenir di wilayah wisata. Hal yang sering dihadapi adalah bahwa kesadaran para ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara terkadang masih ditemukan belum memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan objek wisata di Kabupaten Batu Bara dan Khususnya di objek wisata Pantai Sejarah, sehingga belum ada percepatan pengembangan yang signifikan di tempat tersebut.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 telah berjalan secara optimal dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, masih terdapat kendala terutama pada terbatasnya sumber daya finansial dan sarana prasarana, serta sikap pelaksana kebijakan yang tidak selalu positif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif pada pemasukan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Batu Bara. Dalam mengembangkan potensi pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arruzz Media.
- Strydom, A. J., Mangope, D., & Henama, U. S. (2018). Making Community-Based Tourism Sustainable: Evidence from The Free State Province, South Africa. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 24(1), 7–18. <https://doi.org/10.30892/gtg.24101-338>
- Aprilianto, J. T. (2016). Analisis Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(1).
- Bonita, N. (2016). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin Di Kabupaten Berau. *E- Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Budhi Pamungkas Gautama, Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/ib.v1i4.414>
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132–146. <https://doi.org/10.32666/TATASEIUTA.V7I1.196>
- Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *PERSPEKTIF*, 11(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5225>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.59>
- Julitawaty, W. (2021). *Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Lestari, G., Armawi, A., & Muhammad. (2016). Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2). <https://doi.org/10.22146/jkn.17302>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Californi: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2003). *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugraha, A. R., Perbawasari, S., Zubair, F., & Novianti, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Komunikasi Efektif Berbasis Potensi Wisata dan Kearifan Lokal. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1). <https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3546>
- Putri, M. E. (2020). Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan) Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2).
- Rahimah, I., Ariani, F., Rosmasita, R., Yanti, E. S., & Fani, F. (2020). Analisis Kesesuaian Dan Daya Dukung Wisata Di Pantai Bunga Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Enggano*, 5(3), 392–403. <https://doi.org/10.31186/IENGGANO.5.3.392-403>
- Revida, E., Gaspersz, S., Uktolseja, L. J., Nasrullah, Warella, S. Y., Nurmiati, ... Purba, R. A. (2020). *Pengantar Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ruky, H. A. S. (2003). *Sumber Daya Manusia & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabrina, N., & Mudzhalifah, I. (2018). Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang. *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.32502/iab.v3i2.1449>
- Saputra, D. (2020). Tata Kelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 85–97. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i2.10741>
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–172. <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V24I3.1866>

- Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. (2017). *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soebagyo, S. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia. *Liquidity*, 1(2), 153–158. <https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.145>
- Somantri, G. R. (2010). *Memahami Metode Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Soyomukti, Nuraini. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soyomukti, Nurani. (2010). *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta: Arruzz Media.
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, R., & Nurhayati, E. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Yrama Widya.
- Syah, D. P. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Wisata Banjarejo Kabupaten Grobogan)* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Syahruddin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan II). Bandung: Nusamedia.
- Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah., Pub. L. No. 9, peraturan.bpk.go.id (2015). Indonesia: LN.2015/NO.58, TLN NO.5679, LL SETNEG: 8 HLM.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Wardiyanta. (2006). *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 27–36. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.93>
- Yusrizal, Nikmaturrudha, & Khairuddin. (2015). Tradisi Jamu Laut Dalam Perspektif Sosio Ekonomi Pada Masyarakat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.231>
- Yusup, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Perda No 17 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Barat* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.
- Zakiah, F. U. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017 (Studi Di Kota Bandar Lampung)* (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.